

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Eka Marisca Harliyani ¹⁾; Haryadi ²⁾

¹⁾ Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jambi

²⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract.

The purposes of this study are to analyze the development of local revenue and expenditures in the Jambi Province, to analyze financial performance in view of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the financial dependence, independence, effectiveness PAD, PAD efficiency and harmony of direct expenditures and) to analyze the effect of the financial performance on the Human Development Index (HDI). The analysis of statistics descriptive is used to describe and explain the data such as status/level variables were given in the form of a ratio/percentage, table graphs and diagrams. The data were also analyzed using several analytical tools to test classic assumption, multiple linear regression was used to test the hypothesis. The results showed that only 2 (two) variables (the ratio of the degree of fiscal decentralization and harmony direct spending) affect the HDI significantly. Meanwhile, three other variables (financial dependency, effectiveness and efficiency of PAD) do not significantly affect the HDI. Based on the findings, it could be concluded that the HDI in Jambi Province in the time frame of 2001-2014 was only influenced by the ratio of the degree of fiscal decentralization and harmony direct spending.

Keywords : Fiscal decentralization, the local government financial dependency ratio, Human Development Index (HDI).

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan pendapatan daerah dan belanja daerah di Provinsi Jambi. Untuk menganalisis kinerja keuangan di lihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD dan keserasian belanja langsung dan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis ini adalah metode statistik deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan data yang telah terkumpul secara deskriptif yakni satu/level variabel-variabel yang diamati dalam bentuk rasio/persentase, tabel grafik ataupun diagram dan dengan menggunakan beberapa alat analisis uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dari variabel penelitian hanya 2 (dua) variabel yang signifikan berpengaruh terhadap IPM, dari ke dua variabel tersebut adalah rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung. Sementara itu, tiga variabel yaitu: rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan temuan penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa IPM di Provinsi Jambi periode 2001-2014 dipengaruhi oleh rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas-tugas yang harus dijalankan. Salah satu tugas utama pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang.

Kategori capaian IPM Provinsi Jambi pada tahun 2010 yaitu sebesar 72,74 %, tahun 2011 sebesar 73,30 %, tahun 2012 sebesar 73,78 %, tahun 2013 sebesar 74,35 % dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 74,47 %. Sedangkan IPM nasional pada tahun 2010 sebesar 72,27 %, tahun 2011 sebesar 72,77 %, tahun 2012 sebesar 73,29 %, tahun 2013 sebesar 73,81 % dan tahun 2014 sebesar 74,15 %. Meningkatnya IPM Provinsi Jambi diatas angka capaian IPM nasional. Peningkatan IPM Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai 2014 tidak diimbangi dengan jumlah berkurangnya penduduk miskin di Provinsi Jambi, seharusnya semakin meningkatnya IPM Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dan sebaliknya jumlah penduduk miskin seharusnya makin berkurang, tetapi terjadi malah sebaliknya jumlah penduduk miskin makin bertambah.

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cara pengelolaan keuangan daerah dengan baik, sehingga sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerja keras untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan efek negatif yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan IPM. Kinerja pemerintah yang sering dijadikan acuan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya kinerja keuangan. Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah cukup banyak, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan sisi pendapatan, ada dua pengukuran kinerja yaitu pertumbuhan pendapatan yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam memperoleh pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya dan rasio derajat desentralisasi yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dari sisi belanja ada dua pengukuran juga, yaitu pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun dan rasio keserasian belanja yang menggambarkan keseimbangan antar belanja. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia cita-cita utama bangsa Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, diharapkan dari

pengelolaan pendapatan dan belanja yang ada dialokasikan dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan adanya pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap IPM. Sutaryo (2015) adanya rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap IPM dan rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap IPM. Sementara Amalia (2014) Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif terhadap IPM dalam artian jika kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja meningkat, maka akan meningkatkan IPM.

Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kinerja keuangan di Provinsi Jambi (2) menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap IPM di Provinsi Jambi

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berbentuk *time series* yang berupa laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2001-2014. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Provinsi Jambi:

1. Laporan Realisasi APBD Provinsi Jambi (DJPK) selama periode tahun 2001-2014
2. IPM Provinsi Jambi (BPS) selama periode tahun 2001-2014

Metode Analisis Data

Kinerja keuangan di lihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi PAD dan keserasian belanja langsung, dapat di formulasikan sebagai berikut :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P}{T + P + D} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Kriteria Derajat desentralisasi fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma, dkk 2010)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{P}{T + P + D} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma,dkk 2010)

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{D}{P} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Daerah

Persentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kriteria Kemandirian Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Baik
10,01 - 20,00	Baik
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Kurang
> 50,00	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma,dkk 2010)

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{R}{B} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan Daerah	Kriteria Efektivitas PAD
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Dalam (Bisma,dkk 2010)

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{B}{R} \times \frac{P}{P} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Penelian Efisiensi PAD

% Upah pungut PAD Terhadap PAD	Kriteria Efisiensi PAD
Diatas 40	Tidak Efisen
31 – 40	Kurang Efisien
21 – 30	Cukup Efisien
10 – 20	Efisien
Di bawah 10	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi 2010 dalam Astriana 2014

Rasio Kerasian Belanja Langsung

Rasio keserasian belanja langsung dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{B}{A} \times \frac{P}{B} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Kerasian Belanja Daerah

Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja	Kriteria Kerasian Belanja
0-20	Tidak Serasi
>20 – 40	Kurang Serasi
>40 – 60	Cukup Serasi
>60 – 80	Serasi
>80 – 100	Sangat Serasi

Sumber : Mahsun 2006 dalam Batafor 2011

Dalam rangka menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap IPM Provinsi Jambi, dianalisis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*), dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 DDF + \alpha_2 KKD + \alpha_3 KMD + \alpha_4 EFKPAD + \alpha_5 EFS PAD + \alpha_6 KBL + e$$

dimana :

Y = IPM

α_0 = Konstanta

DDF = Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

KKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

KMD = Rasio Kemandirian Daerah

EFK PAD = Rasio Efektivitas PAD

EFS PAD = Rasio Efisiensi PAD

KBL = Rasio Kerasian Belanja Langsung

Dari persamaan regresi diatas selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian. Adapun pengujian yang akan dilakukan meliputi dua tahap yaitu pengujian ekonometrika (Uji asumsi klasik) dari hasil analisis data dan Uji statistik.

Operasional Variabel

- Indeks Pembangunan Manusia (Y) mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan tiga dimensi pokok pembangunan yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. IPM diukur berdasarkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, paritas daya beli masyarakat dinyatakan dalam persen.
- Derajat Desentralisasi Fiskal (X1), merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan Total Pendapatan Daerah, dinyatakan dalam persen.
- Ketergantungan Keuangan Daerah (X2), merupakan perbandingan antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah, dinyatakan dalam persen.
- Kemandirian Daerah (X3), merupakan perbandingan antara realisasi Dana Perimbangan dengan realisasi PAD, dinyatakan dalam satuan persen.
- Efektivitas PAD (X4), merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Anggaran PAD, dinyatakan dalam persen.
- Efisiensi PAD (X5), merupakan perbandingan antara Biaya Pungut PAD dengan realisasi PAD, dinyatakan dalam persen.
- Keserasian Belanja Langsung (X6), merupakan perbandingan realisasi Belanja Langsung dengan Total Belanja Daerah, dinyatakan dalam persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 7 memberikan rasio derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jambi tahun 2001-2014 terlihat dari hasil perhitungan realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 47,35 persen, dalam kriteria *Baik* dan yang terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 29,14 persen, dalam kriteria *Sedang*.

Tabel 7. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Realisasi PAD	Total Pend Daerah	DDF	Kriteria
2001	87.105.000.000,-	298.891.000.000,-	29,14	Sedang
2002	149.648.000.000,-	449.304.000.000,-	33,31	Cukup
2003	225.323.000.000,-	616.193.000.000,-	36,57	Cukup
2004	287.637.000.000,-	630.144.000.000,-	45,65	Baik
2005	344.880.000.000,-	748.820.000.000,-	46,06	Baik
2006	385.042.000.000,-	1.010.116.000.000,-	38,12	Cukup
2007	451.050.873.300,-	1.155.350.577.267,-	39,04	Cukup
2008	626.524.989.693,-	1.436.796.231.071,-	43,61	Baik
2009	526.442.077.651,-	1.353.900.464.684,-	38,88	Cukup
2010	686.629.000.000,-	1.640.185.000.000,-	41,86	Baik
2011	984.232.579.912,-	2.078.806.913.790,-	47,35	Baik
2012	995.202.289.115,-	2.662.697.133.695,-	37,37	Cukup
2013	1.063.879.903.502,-	2.886.262.906.136,-	36,86	Cukup
2014	1.281.239.472.808,-	3.165.055.792.535,-	40,48	Baik
Rata-Rata			39,59	

Sumber : DJPK (data diolah)

Berdasarkan rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi adalah sebesar 39,59 persen sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat DDF adalah Provinsi dengan tingkat desentralisasi fiskal *Cukup*. Besarnya tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi Jambi melalui optimalisasi perolehan ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah masih menggantungkan pembiayaan dari bagian dana perimbangan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kedepannya, Provinsi Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan PAD-nya melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Jambi selama tahun 2001-2014 terlihat dari hasil perhitungan realisasi pendapatan transfer terhadap total pendapatan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 8. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Pend Transfer	Total Pend Daerah	KKD	Kriteria
2001	177.451.000.000,-	298.891.000.000,-	59,37	Sangat Tinggi
2002	232.946.000.000,-	449.304.000.000,-	51,84	Sangat Tinggi
2003	287.144.000.000,-	616.193.000.000,-	46,60	Tinggi
2004	333.981.000.000,-	630.144.000.000,-	53,00	Sangat Tinggi
2005	393.688.000.000,-	748.820.000.000,-	52,57	Sangat Tinggi
2006	625.074.000.000,-	1.010.116.000.000,-	61,88	Sangat Tinggi
2007	704.299.703.877,-	1.155.350.577.267,-	60,96	Sangat Tinggi
2008	805.271.241.378,-	1.436.796.231.071,-	56,05	Sangat Tinggi
2009	826.020.480.233,-	1.353.900.464.684,-	61,01	Sangat Tinggi
2010	953.131.000.000,-	1.640.185.000.000,-	58,11	Sangat Tinggi
2011	1.093.207.719.996,-	2.078.806.913.790,-	52,59	Sangat Tinggi
2012	1.665.586.782.809,-	2.662.697.133.695,-	62,55	Sangat Tinggi
2013	1.814.055.309.316,-	2.886.262.906.136,-	62,85	Sangat Tinggi
2014	1.882.425.324.008,-	3.165.055.792.535,-	59,47	Sangat Tinggi
Rata-rata			57,06	

Sumber : DJPK (data diolah)

Rasio KKD yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 62,85 persen dan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 46,60 persen. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat menunjukkan persentase yang cenderung berfluktuasi yaitu sebesar 57,06 persen, namun kecenderungan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan rasio kemandirian daerah Provinsi Jambi selama tahun 2001-2014 terlihat dari hasil perhitungan realisasi PAD terhadap dana perimbangan dapat dijelaskan pada Tabel 9. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 91,54 persen, dalam kriteria *Sangat kurang*, dan rasio kemandirian daerah yang terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 49,09 persen, bahwa kemandirian daerah dalam kriteria *Kurang*. Rata-rata rasio tingkat kemandirian daerah Provinsi Jambi adalah sebesar 73,44 persen sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah *Sangat Kurang*. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

Tabel 9. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Realisasi PAD	Dana Perimbangan	KMD	Kriteria
2001	87.105.000.000,-	177.451.000.000,-	49,09	Kurang
2002	149.648.000.000,-	232.946.000.000,-	64,24	Sangat Kurang
2003	225.323.000.000,-	287.144.000.000,-	78,47	Sangat Kurang
2004	287.637.000.000,-	333.981.000.000,-	86,12	Sangat Kurang
2005	344.880.000.000,-	393.688.000.000,-	87,60	Sangat Kurang
2006	385.042.000.000,-	625.074.000.000,-	61,60	Sangat Kurang
2007	451.050.873.300,-	679.281.659.884,-	64,04	Sangat Kurang
2008	626.524.989.693,-	745.860.901.379,-	77,80	Sangat Kurang
2009	526.442.077.651,-	802.060.279.933,-	63,73	Sangat Kurang
2010	686.629.000.000,-	932.205.659.790,-	73,66	Sangat Kurang
2011	984.232.579.912,-	1.075.207.719.996,-	91,54	Sangat Kurang
2012	995.202.289.115,-	1.341.202.292.809,-	74,20	Sangat Kurang
2013	1.063.879.903.502,-	1.487.559.863.316,-	71,52	Sangat Kurang
2014	1.281.239.472.808,-	1.514.518.389.008,-	84,60	Sangat Kurang
Rata-Rata			73,44	

Sumber : DJPK (data diolah)

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan rasio efektivitas PAD Provinsi Jambi selama tahun 2001-2014 terlihat dari hasil perhitungan realisasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dapat dijelaskan pada Tabel 10. Rasio efektivitas. PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2002 dimana pemerintah mencapai hampir mendekati 200 persen yaitu sebesar 183,16 persen dari anggaran yang ditetapkan, Rasio efektivitas PAD yang terendah terjadi pada tahun 2014 dimana pemerintah mampu mencapai 105,14 persen, itupun sudah termasuk kriteria *Sangat efektif* karena melebihi dari 100 persen. Dengan demikian rata-rata peningkatan efektivitas PAD sebesar 136,72 persen. Efektivitas dimaksud memberikan arti bahwa penggunaan anggaran publik telah mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	EFK PAD	Kriteria
2001	87.105.000.000,-	60.687.908.000,-	143,52	Sangat Efektif
2002	149.648.000.000,-	81.704.000.000,-	183,16	Sangat Efektif
2003	225.323.000.000,-	172.303.467.000,-	130,77	Sangat Efektif
2004	287.637.000.000,-	200.123.175.716,-	143,73	Sangat Efektif
2005	344.880.000.000,-	279.997.834.270,-	123,17	Sangat Efektif
2006	385.042.000.000,-	312.884.335.586,-	123,06	Sangat Efektif
2007	451.050.873.300,-	364.927.123.540,-	123,60	Sangat Efektif
2008	626.524.989.693,-	406.306.854.595,-	154,20	Sangat Efektif
2009	526.442.077.651,-	408.309.785.000,-	128,93	Sangat Efektif
2010	686.629.000.000,-	455.795.726.000,-	150,64	Sangat Efektif
2011	984.232.579.912,-	641.658.215.660,-	153,39	Sangat Efektif
2012	995.202.289.115,-	753.366.207.083,-	132,10	Sangat Efektif
2013	1.063.879.903.502,-	902.554.697.570,-	117,87	Sangat Efektif
2014	1.281.239.472.808,-	1.208.837.984.507,-	105,99	Sangat Efektif
Rata-rata			136,72	

Sumber : DJPK (data diolah)

)

Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan rasio efisiensi PAD Provinsi Jambi selama tahun 2001-2014 terlihat dari perhitungan realisasi biaya pungut PAD dengan realisasi PAD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Biaya Pungut PAD	Realisasi PAD	EFS PAD	Kriteria
2001	75.749.000.000,-	87.105.000.000,-	2,61	Sangat Efisien
2002	133.400.000.000,-	149.648.000.000,-	2,67	Sangat Efisien
2003	206.213.000.000,-	225.323.000.000,-	2,75	Sangat Efisien
2004	262.858.000.000,-	287.637.000.000,-	2,74	Sangat Efisien
2005	300.182.000.000,-	344.880.000.000,-	2,61	Sangat Efisien
2006	331.460.000.000,-	385.042.000.000,-	2,58	Sangat Efisien
2007	395.265.625.700,-	451.050.873.300,-	2,63	Sangat Efisien
2008	554.291.661.050,-	626.524.989.693,-	2,65	Sangat Efisien
2009	475.385.693.562,-	526.442.077.651,-	2,71	Sangat Efisien
2010	645.964.932.154,-	686.629.000.000,-	2,82	Sangat Efisien
2011	849.046.797.588,-	984.232.579.912,-	2,59	Sangat Efisien
2012	821.663.816.992,-	995.202.289.115,-	2,48	Sangat Efisien
2013	857.248.509.838,-	1.063.879.903.502,-	2,42	Sangat Efisien
2014	1.025.147.765.733,-	1.281.239.472.808,-	2,40	Sangat Efisien
Rata-rata			2,62	

Sumber : DJPK (data diolah)

Rasio efisiensi PAD yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,82 persen ini disebabkan jumlah pendapatan pajak dan retribusi naik dari tahun sebelumnya Pada tahun 2009 terjadi penurunan PAD disebabkan oleh penurunan pajak kendaraan bermotor sebesar 16,79 persen atau terjadi penurunan sebesar Rp 88,5 milyar.

Rasio Keserasian Belanja Langsung

Berdasarkan rasio keserasian belanja langsung Provinsi Jambi selama tahun 2001-2014 terlihat dari perhitungan realisasi total belanja daerah dengan realisasi belanja langsung dapat dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Rasio Keserasian Belanja Langsung Provinsi Jambi Tahun 2001-2014

Tahun	Total Belanja	Belanja Langsung	KBL	Kriteria
2001	256.498.000.000,-	83.093.000.000,-	32,40	Kurang Serasi
2002	410.306.000.000,-	175.220.000.000,-	42,70	Cukup Serasi
2003	530.074.000.000,-	226.327.000.001,-	42,70	Cukup Serasi
2004	650.675.000.000,-	241.821.000.000,-	37,16	Cukup Serasi
2005	721.830.000.000,-	310.107.000.000,-	42,96	Cukup Serasi
2006	1.115.855.000.000,-	556.524.000.001,-	49,87	Cukup Serasi
2007	1.265.222.521.911,-	710.589.087.774,-	56,16	Cukup Serasi
2008	1.484.199.477.385,-	838.524.912.030,-	56,50	Cukup Serasi
2009	1.702.763.123.587,-	793.911.864.481,-	46,62	Cukup Serasi
2010	1.613.587.302.775,-	815.863.302.775,-	50,56	Cukup Serasi
2011	1.750.241.856.160,-	989.902.384.414,-	56,56	Cukup Serasi
2012	2.558.079.676.618,-	1.363.635.887.510,-	53,31	Cukup Serasi
2013	3.012.362.428.561,-	1.740.362.947.376,-	57,77	Cukup Serasi
2014	3.204.632.835.005,-	1.721.517.299.783,-	53,72	Cukup Serasi
Rata-rata			48,50	

Sumber : DJPK (data diolah)

Rasio keserasian belanja langsung yang terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 32,40persen dalam kriteria *kurang serasi* terhadap total belanja. Sedangkan rata-rata rasio belanja langsung terhadap total belanja Provinsi Jambi adalah sebesar 48,50 persen. Dalam arti kriteria *cukup serasi* terhadap total belanja daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi perlu juga melakukan pengawasan serta pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap dana yang akan dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Estimasi pengaruh kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi diberikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Estimasi Persamaan Regresi

Independent Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
Constant	53,3374	11,4212	4,6700	0.0016
DDF (X1)	0,2295	0,0796	2,8827	0.0204
KKD (X2)	0,1519	0,0863	1,7598	0.1165
EFK PAD (X3)	-0,0229	0,0203	-1,1314	0.2907
EFS PAD (X4)	-1,7060	3,5307	-0,4832	0.6419
KBL (X5)	0,1610	0,0545	2,9528	0.0183
F- hitung	12,6445			
F- table	3,69			
T- table	1,860			
Adjusted-R ²	0,8175			

Sumber : hasil data diolah

Determinasi R² (Adjusted-R²)

Dari hasil analisis diperoleh besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,8175. Nilai 0,8175, variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan daerah berpengaruh sebesar 81,75 persen terhadap IPM Provinsi Jambi, sedangkan sisanya sebesar 18,25 persen digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F

Dari hasil analisis regresi linier berganda di dapat nilai F-hitung sebesar 12,6445 dan F-tabel dengan $df_1 = k - 1$ ($6 - 1 = 5$) dan $df_2 = n - k$ ($14 - 6 = 8$) yaitu sebesar di dapat pada tingkat kepercayaan 95 persen atau $\alpha = 5$ persen adalah sebesar 3,69. Dengan demikian F-tabel ($12,6445 > 3,69$), maka H_0 ditolak artinya rasio DDF, KKD, EFK PAD, EFS PAD dan KSB secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi selama periode tahun 2001-2014. Rasio DDF, KKD, EFK PAD, EFS PAD dan KSB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, hal ini diduga bahwa IPM digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintahan daerah dalam hal penyediaan layanan publik. Di Provinsi Jambi IPM meningkat dan kinerja keuangan pun meningkat setiap tahunnya.

Uji t

Rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabiliti 0,0204. Nilai koefisien variabel sebesar 0,2294 dimana arah positif (+) menandakan adanya hubungan positif, artinya jika kenaikan 1 persen rasio DDF akan meningkatkan angka IPM sebesar 0,2294 persen. Rasio DDF menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya bantuan pemerintah pusat

pemerintah Provinsi Jambi memiliki sumber daya pendanaan selain PAD yang berasal dari total pendapatan daerah yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan IPM.

Rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas 0,1165. Nilai koefisien variabel sebesar 0,1519. Rasio ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan layanan publik dikarenakan pendapatan transfer digunakan untuk menutup pos belanja tidak langsung yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan PAD. Jika pengadaan layanan publik tidak terpengaruh, begitu pun dengan IPM. IPM yang diukur dari pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh oleh pendapatan transfer.

Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas 0,2907. Nilai koefisien variabel sebesar -0,0229. Hubungan yang negatif dan tidak signifikan dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD yang melebihi target penerimaan yang ditetapkan tidak dapat mempengaruhi pelayanan publik untuk meningkatkan IPM. Dengan demikian, IPM sebagai gambaran keberhasilan pemerintah dalam pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh.

Rasio Efisiensi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas 0,6419. Nilai koefisien variabel sebesar -4,831. Hubungan yang negatif dan tidak signifikan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat efisiensi keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin rendah rasio efisiensi biaya pungut PAD terhadap realisasi PAD maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Rasio efisiensi berbanding terbalik dengan kriteria efisiensi.

Rasio keserasian belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai probabilitas 0,0183. Nilai koefisien variabel sebesar 0,1610. Hubungan arah yang positif artinya jika kenaikan 1 persen rasio KBL akan meningkatkan angka IPM sebesar 0,1610 persen. Keberhasilan dalam pembangunan manusia di suatu daerah tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan daerahnya. Peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik dapat terpenuhi melalui alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi belanja pemerintah di sektor tersebut maka dapat meningkatkan pembangunan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi selama periode penelitian berdasarkan perhitungan rasio keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Derajat desentralisasi fiskal kriteria *Cukup baik*
 - b. Ketergantungan keuangan daerah kriteria *Sangat Tinggi*
 - c. Kemandirian daerah kriteria *Sangat kurang*.
 - d. Efektivitas PAD kriteria *Sangat efektif*
 - e. Efisiensi PAD kriteria *Sangat efisien*
 - f. Keserasian belanja langsung kriteria *Cukup serasi*
2. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan

keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi.

Saran

1. Untuk meningkatkan anggaran PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi, agar pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendapatkan realisasi anggaran pendapatan yang lebih besar dan pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya memperhatikan pengalokasian belanja sesuai dengan *outcome* yang hendak dicapai, tidak hanya semata-mata untuk menghabiskan belanja
2. Untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, menurunkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah pemerintah Provinsi Jambi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang belum maksimal yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak pada masyarakat dan untuk tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran penerimaan daerahnya pemerintah Provinsi Jambi dan harus terus mempertahankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia F.R & Purbadarmaja, 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Bali
- Astriana.N.M, 2014. Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Bisma & Susanto, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(2), 81-90
- Batafor, GG, 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT. Tesis Pasca Sarjana Udayana. Publikasi
- BPS Provinsi Jambi 2013. Jambi Dalam Angka. Beberapa Tahun Terbitan
- Damarsari,R.; Junaidi ;Yulmardi Y. (2015). Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2(1), 9-20
- Hardiani,H; Junaidi,J. (2011). Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Orientasi Pembangunan di Provinsi Jambi. Laporan Penelitian. Kerjasama BKKBN dengan PSK UNJA. Jakarta
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Prasetyo.W.E, 2015. Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Tesis Pasca Sarjana Universitas Jember. Publikasi
- Surtayo & Anggraini T, 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap IPM Pemerintah Provinsi di Indonesia
- Winarno.W.W, 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews, UPP STIM YKPN Yogyakarta